

**PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PEMBERDAYAAN
*Review and Perspectives*****EMPOWERMENT BASED AREA DEVELOPMENT PLANNING
*Review and Perspectives*****Fery Murtiningrum¹, Hefri Oktoyoki²**¹Universitas Pat Petulai, ²Universitas Pat Petulai
*Program of Agribusiness, Universitas Pat Petulai*Email: ¹ferymurtiningrum@yahoo.co.id**ABSTRAK**

Perencanaan sebuah kawasan sangat penting sebagai dasar untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan. Perencanaan adalah suatu upaya dalam memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi - asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan - kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Susanto, 2016). Kabupaten Rejang Lebong adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang masuk di dalam zona untuk pengembangan kawasan agribisnis Kopi. Perencanaan untuk pengembangan kawasan kopi di susun oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep yang berkaitan dengan perencanaan kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan kajian literatur

Berdasarkan hasil analisis kajian menunjukkan bahwa agar perencanaan yang telah di susun oleh Pemerintah untuk mencapai sasaran, maka penting dalam proses perencanaan tersebut untuk melibatkan secara aktif masyarakat yang menjadi bagian dari perencanaan. Penelitian ini berdasarkan *review* falsafah atau konsep perencanaan di jurnal-jurnal penelitian, *literature* buku, laporan nasional, regional dan organisasi internasional, *thesis*, prosiding seminar dan lainnya. Teori-teori utama yang digunakan adalah konsep perencanaan, pembangunan, kawasan, dan pemberdayaan yang di jadikan dasar pembangunan berdasarkan pemberdayaan perlu mendapatkan perbaikan dengan mengikutsertakan secara aktif objek yang menjadi sasaran perencanaan untuk bisa aktif menjadi subjek dari perencanaan itu sendiri.

Kata kunci: kawasan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan,

ABSTRACT

Planning an area is very important as a basis for carrying out a development activity. Planning is an effort in selecting and linking facts and making and using assumptions about the future by describing and formulating the activities needed to achieve the desired outcome (Susanto, 2016). Rejang Lebong Regency is one of the Regencies in Bengkulu Province that is included in the zone for the development of the Coffee Agribusiness area. Planning for the development of the coffee area was arranged by the Bengkulu Provincial Government. This study aims to examine the concepts related to regional planning based on community empowerment. The research method used is based on a literature review.

Based on the results of the analysis of the study shows that In order for the Planning that has been prepared by the Government to achieve the target, it is important in the planning process to actively involve the people who are part of the plans made. This research is based on a review of the philosophy or concept of planning in research journals, book literature, national, regional and international organization reports, theses, seminar proceedings and others. The main theories used are the concepts of planning, development, area, and

empowerment. The basis of development based on empowerment needs to be improved by actively involving the objects that are the targets of planning to be actively involved in the planning itself.

Keywords: region, development, community empowerment, planning.

Pendahuluan

Dalam pembangunan suatu wilayah diperlukan perencanaan yang tepat karena dengan perencanaan yang tepat akan mengarahkan pembangunan pada suatu tujuan yang hendak dicapai yang dapat menimbulkan dampak positif terhadap daerah itu sendiri. Perencanaan yang tepat adalah sebuah perencanaan yang dibuat atas dasar potensi atau keunggulan yang dimiliki daerah itu sendiri. Menurut George R. Terry dalam (Riyadi., & Bratakusumah, 2004) perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan juga akan menjadi bahan dalam membuat sebuah kebijakan pembangunan yang mendukung perencanaan tersebut (Simamora & Supriadi, 2013). Perencanaan adalah suatu upaya dalam memilih dan menghubungkan fakta fakta dan membuat serta menggunakan asumsi asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Susanto, 2016). Perencanaan wilayah menurut (R. Tarigan, 2006) adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Menurut Kunarjo (2002) dalam (Syafa'at. et al, 2016) Perencanaan dapat disusun berdasarkan beberapa kriteria, antara lain menurut jangka waktu, menurut ruang lingkup atau tingkat keluwesan. Menurut jangka waktu, ada rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang menurut Tjokroamidjojo (1994) mempunyai sifat dua macam: pertama, merupakan proyeksi keadaan masa depan dengan jangka waktu yang cukup panjang, kedua perencanaan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk

mencapai tujuan tujuan perkembangan dalam masyarakat yang bersifat fundamental dan struktural. Sementara itu menurut Kunarjo (2002) perencanaan biasanya dikaitkan dengan kebutuhan politis seseorang berdasarkan jangka waktu jabatan para pengusaha. Dan perencanaan jangka pendek dapat juga di katakan sebagai perencanaan operasional tahunan yang mempunyai kurun waktu yang pendek yaitu hanya satu tahun.

Program pengembangan wilayah agribisnis yang dilakukan pemerintah selama ini belum sepenuhnya dapat membuat petani lebih berdaya. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengembangan (Syafa'at, Simatupang, Mardianto, & Pranadji, 2016). Permasalahan pembangunan yang tidak melibatkan sumber daya lokal seperti masyarakat desa dan potensi sumber daya alam yang dimiliki menjadi salah satu permasalahan perencanaan pembangunan yang belum akomodatif (Ahmad Sururi & Rahmi Mulyasih, 2017). Perencanaan pembangunan yang diinisiasi dan melibatkan masyarakat diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sebuah proses pembangunan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani pada (Susanto, 2016) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Tentunya dalam sebuah perencanaan kawasan penting untuk berbasikan pemberdayaan masyarakat agar tercapai kondisi yang lebih baik dan perencanaan yang disusun dapat berjalan dengan efektif dan bermanfaat secara berkelanjutan.

Pembangunan pertanian yang dijalankan melalui sebuah proses perencanaan pembangunan telah di susun oleh pemerintah Provinsi Bengkulu kedalam sebuah dokumen Perencanaan *Master Plan* Agrowisata Kampung Kopi Provinsi Bengkulu pada Tahun 2018 dan dokument

selanjutnya yang telah di susun Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berupa Dokument *Action Plan* Kawasan Pertanian Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019-2023. Dokument ini di susun dalam upaya perencanaan kawasan Pertanian, salah satu bagiannya ada perencanaan Kawasan Kopi di Kabupaten Rejang Lebong.

Agar perencanaan yang telah di susun oleh Pemerintah mencapai sasaran, maka penting dalam proses perencanaan tersebut untuk melibatkan secara aktif masyarakat yang menjadi bagian dari perencanaan yang dibuat.

Penelitian ini di dasarkan hasil review berbagi jurnal penelitian sejenis, literature buku, laporan nasional, regional dan organisasi internasional, thesis, prosiding seminar dan lainnya. Teori teori utama yang digunakan adalah konsep perencanaan, pembangunan, kawasan, dan pemberdayaan

Pembangunan Berkelanjutan

Pada awal kemerdekaan paradigama pembangunan yang dianut oleh pemerintah ada paradigma pembangunan industrialisasi. Sejalan perkembangan waktu, memasuki abad ke 21, paradigma pembangunan beralih ke pembangunan sektor pertanian, hal ini disebabkan pada awal abad ke 21, dilanda krisis moneter yang menyebabkan banyak industri dari berbagai jenis terpaksa menghentikan produksi karena meningkatnya ongkos produksi yang disebabkan menurunnya mata uang rupiah terhadap dollar. Tetapi pada saat yang sama sektor pertanian mengalami kenaikan pendapatan karena nilai produk pertanian yang dijual keluar menjadi lebih mahal. Ketahanan sektor pertanian menghadapi krisis moneter ini yang merubah paradigma pembangunan

Pembangunan menurut (Syafa'at. et al, 2016) sebagai upaya untuk melakukan perubahan sosial (*Sosial change*) yang dilakukan secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan tujuan demi eksistensi dan peningkatan mutu kehidupan masyarakat.(Kartasasmita, 1997) mengatakan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan manusia dalam arti yang luas.Tujuan pembangunan harus memuat 3 hal (Syafa'at. et al, 2016) yaitu: (1) pertumbuhan (*growth*); (2) keberlanjutan (*sustainable*) dan (3) pemerataan (*equity*). Kita mengalami perubahan perubahan paradigma pembangunan, Saat ini Perubahan paradigma pembangunan dari mengutamakan indikator kuantitatif kepada keseimbangan dengan indikator kualitatif.Kegagalan pembangunan berbasis pertumbuhan, menciptakan paradigma baru yang meyakini bahwa pembangunan harus diarahkan kepada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*eficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*) yang berimbang dalam pembangunan ekonomi. Mengubah prinsip pertumbuhan semata menjadi prinsip pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*eficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*) menjadi sangat penting bagi pembangunan desa masa kini (Suharyanto & Sofianto, 2012).

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan di maksudkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan.Secara umum, dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Indonesia terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang wajib menjadi acuan yaitu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana tata ruang.Dokumen perencanaan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), sementara RTR baik tingkat nasional dan daerah merupakan amanah UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.Sebagaimana arahan RPJPN 2005-2025, RTR menjadi matra keruangan dari rencana pembangunan.Dengan demikian, rencana pembangunan dan RTR harus serasi satu dengan lainnya.

Perencanaan Kawasan

Teori menyebutkan bahwa salah satu cara yang efektif membangun wilayah adalah dengan pengembangan kawasan (BAPPENAS, 2004) Kawasan adalah suatu wilayah atau daerah tertentu yang mempunyai fungsi tertentu. Kawasan adalah

wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, kawasan didefinisikan sebagai kawasan yang mempunyai fungsi tertentu, dimana kegiatan ekonominya, sektor dan produk unggulannya, mempunyai potensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini secara sendiri-sendiri maupun secara bersama membentuk suatu klaster. Klaster dapat berupa klaster pertanian dan Secara sederhana perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Robinson Tarigan, 2016). Perencanaan adalah suatu upaya dalam memilih dan menghubungkan fakta fakta dan membuat serta menggunakan asumsi asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Susanto, 2016) (Menurut Kunarjo (2002), Perencanaan dapat disusun berdasarkan beberapa kriteria, antara lain menurut jangka waktu, menurut ruang lingkup atau tingkat keluwesan. Menurut jangka waktu, ada rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang mempunyai sifat dua macam: pertama, merupakan proyeksi keadaan masa depan dengan jangka waktu yang cukup panjang, kedua perencanaan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tujuan perkembangan dalam masyarakat yang bersifat fundamental dan struktural. Sementara itu menurut (Kunarjo, 2002) Perencanaan biasanya dikaitkan dengan kebutuhan politis seseorang berdasarkan jangka waktu jabatan para pengusaha. Dan perencanaan jangka pendek dapat juga dikatakan sebagai perencanaan operasional tahunan yang mempunyai kurun waktu yang pendek yaitu hanya satu tahun. Perencanaan pada hakekatnya harus didasarkan pada masalah, kebutuhan dasar dan potensi

wilayah agar pembangunan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah. (Arifien, Fafurida, & Noekent, 2012)

Proses perencanaan pembangunan daerah menurut (Wahyudi, 2006)) Merupakan:

- a. Proses politik. Pemilihan langsung kepala Daerah akan menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM
- b. Proses Teknokratik. Perencanaan yang dilakukan oleh perencanaan professional atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencanaan.
- c. Proses Partisipatif. Perencanaan yang melibatkan masyarakat (Stakeholders) antara lain melalui lembaga musyawarah perencanaan pembangunan.
- d. Proses *Bottom Up* dan *Top Down*. Perencanaan yang aliran prosesnya berlangsung dari atas kebawah atau dari bawah keatas dalam hirarki pembangunan.

Pembangunan kawasan adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan kesalingtergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (*economic system*), masyarakat (*social system*), dan lingkungan hidup beserta sumberdaya alamnya (*ecosystem*). Setiap sistem ini memiliki tujuannya masingmasing. Secara umum, tujuan dari pengembangan kawasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat pedesaan, beserta sarana dan prasarana yang mendukungnya;
2. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat;

4. Mendorong pemerataan pertumbuhan dengan mengurangi disparitas antar daerah.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan konservasi sumberdaya alam demi kesinambungan pembangunan daerah.
6. Mendorong pemanfaatan ruang desa yang efisien dan berkelanjutan.

Perencanaan yang berbasis prakarsa masyarakat adalah perencanaan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat yang dalam proses penyusunannya melibatkan masyarakat yang ada di sekitar kawasan yang akan di kembangkan. Upaya ini memerlukan perubahan kebijakan yang selama ini membatasi dan tidak mengakui aspirasi masyarakat, serta harus mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga mampu memberdayakan masyarakat. Perencanaan seperti ini bukan berarti mengurangi peran pemerintah, tetapi justru memperbesar peran pemerintah dalam upaya memberikan bimbingan sebagai upaya memberdayakan masyarakat.

Pembangunan kawasan memerlukan penentuan lokasi atau kawasan yang tepat dan efisien. Untuk itu di perlukan perencanaan yang matang yang melibatkan partisipasi seluruh masyarakat minimal mengakomodir kepentingan masyarakat yang menghasilkan rumusan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat. Analisis kawasan mempunyai tujuan untuk menjelaskan proses bagaimana berbagai kegiatan kehidupan mengorganisasi diri dalam suatu ruang geografi untuk mencapai tujuan bersama. Berbagai kegiatan yang dimaksud meliputi kegiatan sosial budaya seperti adat istiadat, mata pencaharian utama, dan tingkat pendidikan. Kegiatan ekonomi, kegiatan pelestarian lingkungan dan kegiatan lain yang sudah ada di kawasan.

Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut (Mardiakanto Totok dan Soebiato Poerwoko, 2015) pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh

masyarakat dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat dididik untuk menerapkan setiap inovasi (informasi baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya.

Sumodiningrat (1999) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia, menciptakan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Berdasarkan pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka menurut Mardiankanto (2012), pemberdayaan memiliki prinsip prinsip:

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui "mengerjakan" mereka akan mengalami proses belajar (Baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus di ingat untuk jangka waktu yang lama.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan

akibat atau pengaruh yang baik dan bermanfaat, karena perasaan senang/puas atau tidak senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/pemberdayaan di masa masa mendatang.

3. Asosiasi, artinya setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengkaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya. Misalnya dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada pemberdayaan tentang persiapan lahan yang baik, melihat tanaman yang kerdil/subur akan mengingatkannya kepada usaha usaha pemupukan dan lain lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini berdasarkan review literature penelitian ilmiah yang telah di publikasi di dalam jurnal penelitian, buku, laporan nasional, regional dan organisasi internasional, Disertasi, prosiding seminar dan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Model Perencanaan pengembangan kawasan di dasarkan pada konsep konsep pengembangan wilayah didalam teori teori Pembangunan. Pengembangan kawasan adalah upaya untuk memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat pada kawasan tertentu dengan berdasarkan pada produk unggulan di kawasan itu, upaya untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan kawasan yang di terapkan (BAPPENAS, 2004)dalam (Setiyanto, 2013) adalah ;1, Konsep pengembangan kawasan berbasis karakter sumberdaya yaitu (a) pengembangan kawasan berbasis sumberdaya, (b) pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan, (c) pengembangan kawasan berbasis efisiensi, (d) pengembangan kawasan berbasis pelaku

pembangunan. 2. Konsep pengembangan kawasan berbasis penantaan ruang yang membagi wilayah kedalam (a) pusat pertumbuhan, (b) integrasi fungsional, dan (c) desentralisasi. 3. Konsep pengembangan kawasan terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang pada umumnya diterapkan di daerah daerah tertinggal. 4. Konsep pengembangan kawasan berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan dan upaya upaya inovasi pengembangannya.

Perencanaan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah upaya penerapan konsepkonsep pembangunan ekonomi pada dimensi keruangan, sehingga perencanaan pengembangan wilayah merupakan akumulasi yang tidak terputus dari konsep pembangunan ekonomi yang melihat peluang dan penawaran (opportunity and supply side), yaitu dari kemampuan atau potensi wilayah itu untuk dikembangkan, dan dari segi permintaan sebagai peluang (demand side – market opportunity) untuk membangun(Harun, 2010). Pembangunan terpadu inovatif merupakan siklus pembangunan yang dimulai dari proses identifikasi potensi sumberdaya dan kemudian menentukan arah pembangunan yang melibatkan segenap unsur desa. Setelah ditentukan arah pembangunan, pengelolaan sumberdaya desa perlu ditetapkan secara tepat dan benar.Inti dari pembangunan terpadu inovatif adalah proses yang mengutamakan sinkronisasi antarsektor dan antarpelaku serta mengedepankan inovasi dalam berbagai bidang sebagai tekniknya. Dengan demikian, hasil pembangunan akan menciptakan pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Hasil-hasil tersebut akan menjadi bahan masukan bagi pembangunan tahap berikutnya (Suharyanto & Sofianto, 2012)

Perencanaan yang baik akan sangat membantu dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu dalam proses penyusunan

perencanaan sangatlah penting untuk memperhatikan bagaimana sebuah perencanaan di susun, siapa saja aktor yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan, strategi apa yang digunakan dan hal hal apa saja yang mendukung serta menghambat upaya perencanaan pembangunan (Fadlina, Supriyono, & Soeaidy, 2013)

Beberapa pendekatan perencanaan yang dilakukan yaitu pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, serta Top Down dan Bottom Up Planing yang penerapannya di sesuaikan dengan konteks perencanaan (Fadlina et al., 2013). Konsep Perencanaan lainnya yaitu Konsep "Spatial Planning System" bersifat terpusat dan mengejar pertumbuhan nasional, tetapi belum berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu mengatasi ketimpangan wilayah (Sawitri, 2006) hal ini disebabkan sifat eksploitatif dari praktek perencanaan pengembangan wilayah ini telah memperlemah kondisi wilayah belakang, demi mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Kesimpulan

Dari studi literature di ketahui bahwa proses perencanaan yang telah ada selama ini sangatlah sedikit melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan belum di temukan berbasiskan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu kedepan penting dan perlu di carikan model perencanaan pemberdayaan masyarakat berbasiskan pemberdayaan masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih disampaikan kepada Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Rekan Rekan yang telah mensupport terselesaikannya tulisan ini.

Daftar Pustaka

Ahmad Sururi, & Rahmi Mulyasih. (2017). Pemberdayaan Masyarakat melalui Inovasi Perencanaan Pembangunan

berbasis 4R (Rebug, Rencana, Realisasi dan Rawat) di Desa Cilangkap Kecamatan Wanasalam sebagai Pilar Utama Kebijakan Partisipatif dan Gotong Royong. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 218–238.

<https://doi.org/10.29062/engagement.v1i2.17>

Arifien, M., Fafurida, F., & Noekent, V. (2012). Perencanaan Pembangunan Berbasis Pertanian Tanaman Pangan Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2), 288. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i2.175>

Aryanto, Rudy & Idris Gautama. (2012). Perencanaan Manajemen Lanskap Zonasi Destinasi Wisata Budaya Kota Tua Jakarta. *Jurnal Binus Business Review*. 3 No 2, hal 973-982

Ariowibowo, Renardi. et al. (2017). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Alam Pulisan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Agri Sosio Ekonomi Unsrat*. 13(1A).

BAPPENAS. (2004). *Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan untuk percepatan Pembangunan Daerah* (1 ed.). Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.

Deysi Kasake. (2017) Analisis Perencanaan Pola Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Sindulang Satu Kecamatan Timinting, Kota Manado. *Jurnal Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*. 13 (1A), 101-108

Dwi Lestari, Widya dan Marom (Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015.

- Journal of Public Policy and Manajemen Review*, 6(2), 2017. DOI: [10.14710/jppmr.v6i2.15533](https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15533)
- Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyan R. (2009). *Perencanaan dan pengembangan wilayah* (ke 4 Mei 2; A. E. Pravitasari, ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Endang Sri Sudalmi. (2010). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Pertanian*, 9(2), 15-28
- Elviseni Yuliet. (2019). Perencanaan kawasan pariwisata di Kecamatan Tomohon Selatan. *Jurnal Spasial*. 6 No 3, Hal 609-618
- Fadlina, I. M., Supriyono, B., & Soeaidy, S. (2013). PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN (Kajian tentang Pengembangan Pertanian Organik di Kota Batu) Sustainable Development of Agrocultural (Studies on Organic Agricultural Development in Batu City). *J-Pal*, 4(Perencanaan pembangunan pertanian berkelanjutan), 43–57.
- Fachrudin, Hilman Tamiami dan Muhammad Dolok Lubis (2016). Planning for Riverside Area as Water Tourism Destination to Improve Quality of Life Local Residents, Case Study: Batuan – Sikambing River, Medan, Indonesia. *Jurnal Social and Behavioral Sciences* 234 (434 – 441_
- Gehrke, Esther dan Renate Hartwing. (2018). Productive effects of public works programs: what do we know? What should we know?. *Jurnal World Development* 107 (111-124)
- Hadi, Agus Purbathin (2010). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan. *Jurnal Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Harun, U. (2010). Model Perencanaan Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 10(1), 1–14.
- Idajati, Hertiaro, et al. (2016). Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perencanaan proses dan proses Musrenbang secara online di Rungkut District Surabaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Perilaku*. 227 hal 493-497
- Kartasasmita, G. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat; Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Surabaya.
- Kunarjo. (2002). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Mardiakanto Totok dan Soebiato Poerwoko. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (4 ed.). Bandung: Penerbit ALFABETA Bandung.
- Mardikanto T dan Sutarni Sri. (2003). *Redefinisi dan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian Sukoharjo*. Sukoharjo-Solo: Prima Theresia Pressindo.
- Mandasaria, Jayanti, Mimi Arifina, Mukti Alia. (2016). Settlement arrangement based on landslide mitigation (Case study: Capagallung, west Bacukiki District, City of Parepare). *Jurnal Social and Behavioral Sciences* 227 (442 – 450).
- Miradani, Sukma Dini (2010). Analisis Perencanaan Pembangunan Agroindustri Provinsi Jawa Timur Pendekatan Sektor dan Regional. *Jurnal Majalah ekonomi*, Tahun XX, (119-135).

- Mukhsin, Dadan. (2014). Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Hunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol.14 No.1, Hal 1-11
- Prastika Lea dan Kismartini.(2017). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kelurahan Tanjung Agung Mas Semarang. *Journal of Public Policy and Manajemen Review* 6(2)
DOI: [10.14710/jppmr.v6i2.16066](https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.16066)
- Purwanto, et al (2016). Spatio temporal analysis trend of land use and land cover change against temperature based on remote sensing data in Malang City. *Jurnal Social and Behavioral Sciences* 227 (232 – 238)
- Putra, Sasangko., Purwanto, Kismartini (2013). Perencanaan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Selo. *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2013*. Vol 33 Hal 40.
- Riyadi., & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rustan Harun. (2010) Model Perencanaan Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara. *Jurnal Perencanaan wilayah dan kota* 10(1)
- Rahayu H, et al. (2018) Strategic Challenges in development planning for Denpasar City and the coastal urban agglomeration of Sarbagita. *Jurnal Procedia Engineering*. 212, Hal 1347-1354
- Sawitri, D. (2006). Keikutsertaan Masyarakat Dalam Pengembangan Lokal (Studi Kasus: Pengembangan Desa di Jawa Barat). *Journal of Regional and City Planning*, 17(1), 39–60.
- Said, Farah Rara, Nany Yuliasuti. (2013) Mass housing sustainability based on community cohesion (A case study at Sendangmulyo, Indonesia). *Jurnal Procedia Environmental Sciences* 17 (814 – 821)
- Setiyanto, A. (2013). Approach and Implementation of Priority Agricultural Commodity Zone Development. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 31 No 2(Tanaman Pangan), 171–195.
- Simamora, A. P., & Supriadi, S. (2013). *ANALISIS POTENSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN*. 16(2), 54–66.
- Suharyanto, S., & Sofianto, A. (2012). Model Pembangunan Desa Terpadu Inovatif di Jawa Tengah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 251–260.
<https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260>
- Susanto, A. (2016). Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Balai Taman Nasional Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.
- Sukma, Pradiwi et al.(2013). Identifikasi masalah dalam rencana penerapan teknologi tepat guna untuk air dan sanitasi dengan pendekatan FGD (Studi Kasus: Kampung Sodana, Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 17 Hal 984-991
- Syafa'at, N., Simatupang, P., Mardianto, S., & Pranadji, T. (2016). Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Agribisnis Dalam Rangka

Pemberdayaan Petani. *Forum penelitian Agro Ekonomi*.
<https://doi.org/10.21082/fae.v21n1.2003.26-43>

Syahza Almasdi dan Suarman (Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan (2013). *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14(1) Juni 2013 (126-139)

Syahrani, Husainie. (2011) Penerapan Agropolitan dan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal FRONTIR* Nomor 33.

Tarigan, R. (2006). *Perencanaan Pembangunan Wilayah* (Edisi Revi). Jakarta: Bumi Aksara.

Tarigan, Robinson. (2016). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Ketiga). Bandung: ALFABETA.

VincentiaReniVitasurya.(2015)Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village,Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Social andBehavioral Sciences* 216 (2016) 97 – 108.

Wahyudi, I. (2006). *Metodologi Perencanaan Partisipatif*. Jakarta: Kerjasama Malang Corruption Watch dan YAPPIKA.

Wrihatnolo R.R dan Dwijoyowiyoto R.N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Komputindo.